



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<https://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

DAMPAK DIGITALISASI TERHADAP BIROKRASI: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM ERA PEMERINTAHAN TERBUKA

Sarah Meirina Sari

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Email Corresponding: sarah.meirina.fisip@upnjatim.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 2 May 2024

Revised date: 10 June 2024

Accepted date: 5 July 2024

In the era of globalization and rapid technological advancement, digitalization has become a transformational phenomenon that influences various aspects of life, including public administration and governance. The rapid development of Information and Communication Technology (ICT) has facilitated communication, accelerated processes, and reduced costs, significantly impacting the structure and processes of bureaucracy. This study is a literature review, with primary data sourced from books and journals published in Indonesia. Ultimately, this research is useful for public policy studies. In Indonesia, the implementation of digitalization in bureaucracy is crucial for realizing an open government, which enhances transparency, accountability, and public participation. The integration of ICT in governance, as outlined in Presidential Regulation No. 82 of 2023, aims to improve public services and make the government more accessible. However, digitalization in bureaucracy also presents challenges, including the digital divide, data security issues, and the need for cultural changes within government institutions. This paper explores how technology can enhance public participation and transparency, as well as the impact of digitalization on bureaucracy within the context of open government.

Keyword: Digitalization, bureaucracy, open government, public participation, transparency, governance.

ABSTRAKSI

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, digitalisasi telah menjadi fenomena transformasional yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi publik dan pemerintahan. Perkembangan cepat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mempermudah komunikasi, mempercepat proses, dan mengurangi biaya, yang berdampak signifikan pada struktur dan proses birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dan data utamanya bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia. Penelitian ini pada akhirnya berguna untuk kajian kebijakan publik. Di Indonesia, penerapan digitalisasi dalam birokrasi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Integrasi TIK dalam pemerintahan, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023, bertujuan untuk memperbaiki layanan publik dan menjadikan pemerintah lebih mudah diakses. Namun, digitalisasi dalam birokrasi juga menghadirkan tantangan, termasuk kesenjangan digital, masalah keamanan data, dan kebutuhan perubahan budaya dalam institusi pemerintah. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dan dampak digitalisasi terhadap birokrasi dalam konteks pemerintahan terbuka.

Kata Kunci: Digitalisasi, birokrasi, pemerintahan terbuka, partisipasi publik, transparansi, tata kelola.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi telah menjadi fenomena yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perkembangan TIK yang sangat cepat telah membawa ke dalam era digital, dimana komunikasi dan interaksi menjadi lebih mudah, murah, dan cepat (Alkhajar et al., 2022). Digitalisasi telah menjadi kekuatan transformasional yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik. Pada era pemerintahan terbuka, digitalisasi tidak hanya menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks bagi birokrasi. Pemerintahan terbuka mengedepankan partisipasi publik, akses informasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Di Indonesia, pemerintahan terbuka menjadi salah satu agenda utama yang diusung untuk memperkuat partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perkembangan digitalisasi di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap birokrasi, mengubah cara pemerintah memberikan layanan publik dan berinteraksi dengan masyarakat. Digitalisasi berperan penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka, seperti akses informasi yang lebih baik dan kemudahan dalam berinteraksi antara pemerintah dan warga. Digitalisasi telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Birokrasi di Indonesia telah berkembang seiring berjalannya waktu, meskipun seringkali mendapatkan kritik dari masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Max Weber, birokrasi berfungsi sebagai "*machine of country*" yang menunjukkan pentingnya peran birokrasi dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, kemajuan teknologi digital memaksa semua aspek kehidupan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, yang kini semakin terintegrasi dengan teknologi digital menuju digitalisasi birokrasi dan demokratisasi (Noak, 2022). Digitalisasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F juga menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Pasal ini menjelaskan bahwa hak individu untuk berkomunikasi dan mengakses informasi yang relevan dalam konteks digitalisasi birokrasi, dengan penerapan TIK pemerintah dapat menyediakan layanan dan informasi secara lebih efisien dan memudahkan masyarakat untuk mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka karena birokrasi yang tradisional dengan struktur hierarkis dan prosedur yang ketat, sering kali tidak selaras dengan dinamika cepat yang ditawarkan oleh teknologi digital.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dampak digitalisasi terhadap birokrasi, baik dari segi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan publik maupun tantangan yang perlu diatasi agar transformasi digital dapat berlangsung efektif. Pengambilan keputusan yang tepat menjadi salah satu cara pemerintah dalam menghadapi tantangan dan evaluasi dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan (Sari & Damanik, 2021). Melihat kajian permasalahan digitalisasi birokrasi di atas maka tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana dampak digitalisasi terhadap birokrasi dalam era pemerintahan yang terbuka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi terhadap birokrasi dalam konteks pemerintahan terbuka, dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam administrasi publik, sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Sumber data tersebut diperoleh dari berbagai publikasi buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang diterbitkan di Indonesia, yang relevan dengan topik kajian. Melalui analisis mendalam terhadap literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pemikiran, dan temuan-temuan terkini yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru bagi

pengembangan teori kebijakan publik, tetapi juga dapat menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN

Digitalisasi Birokrasi

Digitalisasi birokrasi adalah perubahan dalam sebuah transformasi yang terdapat perombakan birokrasi yang menuju kepada *dynamic governance* dan mengikuti arus birokrasi dunia dengan karakteristik adaptif dan *agile* (Spaltani, 2024). Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang pesat, birokrasi dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan ini guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Di era di mana informasi dapat diakses secara instan, tuntutan akan pelayanan yang cepat dan akuntabel semakin meningkat.

Kemajuan digitalisasi pada birokrasi sektor publik di berbagai negara telah berlangsung dengan sangat cepat dan sejalan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Transformasi reformasi terjadi pada tahun 2013 dengan basis dan berorientasi terhadap aturan (*rulebased bureaucracy*), tapi pada tahun 2018 mengalami pergeseran dalam birokrasi dengan diterapkannya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). SPBE di Indonesia diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Sehingga, akan tercipta pelayanan pemerintah yang lebih sederhana, yang memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat, berdasarkan pada struktur, budaya, dan kompetensi digital.

Percepatan transformasi digital juga harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan dan rintangannya. Kesiapan yang diperlukan pemerintah yaitu dengan mengikuti arah perubahan kebiasaan digital yang harus disinkronisasi agar tidak menjadi sebuah hambatan untuk menjalankan perubahan digital; transparan dan terbuka dalam pemanfaatan TIK untuk memberikan kemudahan dengan langkah kolaborasi dengan bantuan kerja sama antar pihak kepentingan; dibutuhkan kerja sama dan hal yang bisa membantu beradaptasi dengan transformasi digital (Firdaus et al., 2021). Pemerintah perlu mengantisipasi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut untuk memastikan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintah yang terbuka.

Namun, hal yang lebih krusial dibandingkan transformasi digital adalah perubahan dalam budaya kerja. Transformasi digital berfokus pada perubahan budaya organisasi dibandingkan hanya menerapkan teknologi baru. Teknologi berperan sebagai katalis dalam perubahan (Noak, 2022). Saat ini, birokrasi pemerintah didominasi oleh ASN muda yang sangat mendukung digitalisasi karena mengadopsi model yang fleksibel dan sesuai dengan para kebutuhan ASN. Dengan membangun birokrasi yang fleksibel, pegawai dapat bekerja dengan ritme yang sama dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara terkoordinasi, sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat (Rulinawaty et al., 2020). Fleksibilitas pada transformasi digital juga tergantung pada elemen organisasi dan tingkat birokrasi yang memberikan ruang bagi publik. Teknologi digital merubah beberapa aspek, seperti aplikasi, proses, struktur, budaya, tanggung jawab, dan tugas pegawai (Tangi et al., 2021). Pada akhirnya, pelayanan birokrasi yang berbasis digital ini dapat memudahkan pegawai dalam pelayanan publik, sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi pelayanan dalam menghadapi proses demokrasi (Løberg, 2021).

Pemerintahan Terbuka

Pemerintahan terbuka merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan partisipatoris yang mencakup proses pengelolaan sumber daya publik sejak proses pengambilan keputusan hingga evaluasi (Febriananingsih, 2012). Pada pemerintahan terbuka mensyaratkan adanya 5 (lima) jaminan, yaitu *right to observe*, *right to information*, *right to participate*, kebebasan berekspresi, dan hak mengajukan keberatan terhadap penolakan hak. Sehingga hak publik dalam mendapatkan informasi menjadi syarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

Pelaksanaan pemerintahan terbuka diatur dalam Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dijelaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan akses informasi secara terbuka kepada masyarakat dan menyediakan dokumen sebagai bagian dari fungsi birokrasi dan mengatur sanksi bagi pelanggar dan jenis informasi pemerintah yang dapat dikecualikan dari keterbukaan kepada publik dalam periode tertentu. Hak publik terhadap informasi tercantum pada pasal 4, yaitu hak untuk mengetahui informasi publik, hak untuk menghadiri pertemuan publik terbuka untuk

memperoleh informasi publik, hak untuk mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, dan/atau hak untuk dapat menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengecualian informasi publik juga berlaku yang diatur pada pasal 2, pasal 17 dan pasal 20 pada UU tersebut. Informasi yang dikecualikan, seperti informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum, informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak dan kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat, informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi publik yang dapat menjelaskan kekayaan yang dimiliki negara pada sektor alam, informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik seseorang, informasi publik yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi, memorandum antar badan publik, dan informasi yang tidak boleh boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Digitalisasi Birokrasi Terhadap Pemerintahan Terbuka

Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi birokrasi telah menjadi salah satu pilar utama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses digitalisasi birokrasi mengacu pada penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek administrasi dan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat. Transformasi pada birokrasi juga melibatkan pemanfaatan teknologi digital yang memainkan peran penting dalam mewujudkan *good governance*.

Penerapan *good governance* membutuhkan kolaborasi dari 3 (tiga) pilar utama, yaitu dari pemerintah, swasta dan masyarakat (Riris Kusmiyati, Rahmanita Ginting, 2023). Keberhasilan *good governance* tercermin dari terciptanya hubungan yang harmonis antara ketiga elemen tersebut. Jika ketiga elemen tersebut tidak harmonis, maka birokrasi akan kembali ke birokrasi yang tradisional karena kurangnya dukungan yang seimbang (Kusmiyati, 2023).

Birokrasi tradisional sering kali diidentikkan dengan prosedur yang lamban, tumpukan dokumen

fisik, serta birokrasi yang hierarkis dan terkesan tidak responsif. Transformasi menuju digitalisasi birokrasi membawa perubahan mendasar terhadap paradigma tersebut. Digitalisasi memungkinkan sistem pemerintahan untuk bergerak lebih cepat melalui automasi proses, integrasi data, dan penggunaan platform daring. Contoh konkret implementasi digitalisasi ini meliputi sistem *e-government*, *e-budgeting*, *e-procurement*, dan layanan publik berbasis aplikasi.

Pemerintahan terbuka adalah sebuah konsep yang bertumpu pada prinsip transparansi, partisipasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Digitalisasi birokrasi berperan sebagai katalis dalam mewujudkan pemerintahan terbuka, dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

Dampak dari adanya digitalisasi tengah dirasakan oleh seluruh pihak mulai dari aktivitas perkantoran, hingga penyelenggaraan persidangan telah memanfaatkan digitalisasi dengan pempberlakuan *e-court*, pada sektor pemerintahan juga digitalisasi dirasakan mulai dari pendaftaran pelayanan masyarakat hingga pelaporan pajak sehingga masyarakat dipaksa untuk adaptif dengan perkembangan teknologi digital yang dekat dengan sekeliling (Spaltani, 2024). Sistem pemerintahan berbasis digital telah direalisasikan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan yang prima, efisien dan efektif dengan menerapkan penerimaan, penyaluran, dan penyebaran informasi sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang akuntabel (Riris Kusmiyati, Rahmanita Ginting, 2023).

Dengan terbukanya pemerintah, maka birokrasi di Indonesia akan berkembang dengan adanya digitalisasi yang akan berdampak pada (1) transparansi informasi terkait kebijakan, anggaran, bahkan program pemerintah yang dapat mudah diakses oleh masyarakat (Kanter et al., 2006); (2) pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik dapat mudah dipantau secara *realtime* (Huda, 2020); (3) dapat mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan saran melalui *platform* daring untuk menciptakan hubungan 2 (dua) arah antara pemerintah dan masyarakat (Rahmadhani et al., 2022).

Teknologi membuktikan bahwa dapat mendorong proses terjadinya digitalisasi dalam birokrasi yang dapat mempermudah proses komunikasi, partisipasi publik dan transparansi

antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang peduli terhadap keputusan ataupun isu yang sedang berkembang pada bidang pemerintahan, cenderung akan merasakan membutuhkan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan (Harahap & Harahap, 2023). Partisipasi masyarakat akan terjadi saat mereka memiliki kepentingan yang signifikan terhadap keputusan atau kebijakan yang dibuat sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah yang menjadi salah satu faktor yang krusial dalam penentuan keberhasilan suatu kebijakan (Harahap & Harahap, 2023).

Meskipun digitalisasi birokrasi pada pemerintahan terbuka membawa banyak manfaat, tetapi hambatan yang dihadapi pemerintah juga luar biasa. Adanya kesenjangan digital yang mengacu pada perbedaan dalam akses, pemahaman, dan penggunaan TIK terjadi di antara berbagai macam kelompok masyarakat (San Mikael Sinambela et al., 2024). Kesenjangan dalam konteks ketidakseimbangan pada penggunaan teknologi digital ini mencakup aspek akses terhadap perangkat teknologi, koneksi internet, keterampilan digital, serta adopsi teknologi secara merata dalam masyarakat. Selain itu, kesenjangan digital juga mencakup penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan.

Penggunaan teknologi digital juga dapat meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan terbuka (Rahman et al., 2024). Ketika pemerintah menggunakan teknologi digital, banyak data pribadi masyarakat yang terkumpul, seperti identitas, informasi kesehatan, bahkan transaksi keuangan. Jika data ini tidak terlindungi, maka masyarakat akan merasa tidak aman dan khawatir terkait informasi pribadi yang akan disalahgunakan, seperti adanya penipuan dan pencurian identitas. Kebocoran data dan serangan siber tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak reputasi pemerintah di mata publik (Rahakbauw & Batubara, 2024). Pemerintah yang dianggap gagal menjaga keamanan digital bisa kehilangan legitimasi, terutama jika insiden tersebut terus berulang tanpa adanya solusi yang memadai.

Digitalisasi birokrasi dalam konteks pemerintahan terbuka menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal,

pemerintah perlu mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital, perlindungan data pribadi, dan kesiapan infrastruktur yang memadai. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta komitmen terhadap keamanan data, transformasi digital dalam birokrasi dapat menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan terpercaya. Keberhasilan digitalisasi birokrasi tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada integritas dan kesiapan seluruh elemen masyarakat untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam sistem yang lebih terbuka dan modern.

KESIMPULAN

Digitalisasi birokrasi dalam konteks pemerintahan terbuka menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Transformasi digital ini memungkinkan proses pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif melalui penggunaan teknologi yang mempermudah akses informasi, interaksi publik, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, tantangan-tantangan seperti kesenjangan digital, perlindungan data pribadi, dan kesiapan infrastruktur harus diatasi dengan hati-hati.

Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan terpercaya. Pemerintah perlu menjaga keamanan data pribadi dan menanggulangi risiko kebocoran data serta serangan siber yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Dengan adanya komitmen untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, digitalisasi birokrasi dapat menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integritas dan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.

REFERENSI

Alkhajar, E. N. S., Sari, S. M., & Luthfia, A. R. (2022). *Dunia Digital dan Kebijakan Publik: Urgensi Imunitas Publik terhadap Hoaks*. Madza Media.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/e vjax>

- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1), 135–156.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybern.an.v4i2.1244>
- Harahap, A. F. R., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 769. <https://doi.org/10.29210/1202323208>
- Huda, M. N. (2020). Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 67–82. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.6658>
- Kanter, M. E., Lengkong, F. D., & Tulusan, F. G. (2006). Transparansi Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa Di Desa Amongena Iii Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), 79–87.
- Løberg, I. B. (2021). Efficiency through digitalization? How electronic communication between frontline workers and clients can spur a demand for services. *Government Information Quarterly*, 38(2), 101551. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101551>
- Noak, P. A. (2022). Digitalisasi Birokrasi Dalam Wilayah Publik Dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 4(2), 132–144. <https://doi.org/10.24843/jiws.2022.v04.i02.p05>
- Rahakbauw, I. K., & Batubara, I. A. (2024). Analisis Potensi Ancaman Siber pada Bidang Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 7(1), 3–4. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10089>
- Rahmadhani, W. A., King, D., Ginting, E. M. B., Fernandes, Sijabat, D., Raviqy, R., & Amin, M. (2022). Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Transparansi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Pemanfaatan Digitalisasi Pada Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 1167–1182. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2979>
- Rahman, Z. A., Informatika, T., Teknik, F., Asahan, U., Naga, K., & Utara, S. (2024). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Edukasi Literasi Digital untuk Peningkatan Keamanan Data dan Pencegahan Kejahatan Siber di Masyarakat Rawang Panca Arga*. 6.
- Riris Kusmiyati, Rahmanita Ginting, M. T. (2023). DIGITALISASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (PELUANG DAN TANTANGANNYA). *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 7(1), 33–46.
- Rulinawaty, Aripin, S., & Samboteng, L. (2020). Leading Agile Organization Can Indonesian Bureaucracy Become Agile? *Talent Development & Excellence*, 12(3s), 330–338. <http://www.iratde.com>
- San Mikael Sinambela, Joy Novi Yanti Lumbantobing, Mima Defliyanti Saragih, Al Firman Mangunsong, Chairun Nisa, Johan Pardamean Simanjuntak, & Jamaludin Jamaludin. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 15–24. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3003>
- Sari, S. M., & Damanik, J. (2021). TOURISM POLICY MAKING DURING AN EMERGENCY: The Case of Yogyakarta City during COVID-19 Pandemic. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 25(2), 131–147. <https://doi.org/10.22146/jkap.67344>
- Spaltani, B. G. (2024). DIGITALISASI BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP ETIKA PEJABAT PUBLIK. *Jurnal Suara Keadilan*, 25(1), 26–39. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/viewFile/13353/4914>
- Tangi, L., Janssen, M., Benedetti, M., & Noci, G. (2021). Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and impeding factors. *International*

Journal of Information Management, 60,
102356.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102356>